

KONSEPSI PEMIKIRAN DASAR EKONOMI ISLAM, EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Alvien Septian Haerisma

Mahasiswa Pascasarjana program Doktor UIN Yogyakarta

Email: *alvienseptian@gmail.com*

Abstract

*Normatively, religious teachings can influence economic activity in the previous economic system. Meanwhile the Islamic economic system is far ahead which inspires the thinking of the two major economic systems, because the Islamic economic system is inspired by the Koran and al-Hadith. Meanwhile, Indonesia prioritizing the unification of the national economy which is characterized by the value of Pancasila and the 1945 Constitution which is based on the value of God. Using the literature study method, this research produced, first, the basic thinking of Islamic economics consisting of monotheism and brotherhood, work and productivity, ownership and equitable distribution. Pancasila economic principles consist of economic, social and moral integration, social equality, nationalistic spirit, cooperation, decentralization, and regional autonomy. The principle of the popular economy consists of the economy compiled the principle of kinship, the livelihood of the people is controlled by the state, all wealth is controlled by the state and used for the prosperity of the people. Second, the equality of the three reflects ethics, norms and morals, equality, nationalistic values, the role of micro institutions, decentralization and regional autonomy. The difference reflects ethics, norms, and morals by the philosophy of the Koran and al-Hadith, creating a prosperous country, prioritizing the value of *hablum minallah* and *hablum minannas*.*

Keywords: *Islamic Economics, Pancasila Economics and Kerakyatan Economics.*

Abstrak

*Secara normatif bahwa ajaran agama dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi pada sistem ekonomi sebelumnya. Sementara itu sistem ekonomi Islam jauh lebih dahulu yang memberikan inspirasi pemikiran kedua sistem ekonomi besar tersebut, karena sistem ekonomi Islam diilhami al-Quran dan al-Hadits. Sementara itu, di Indonesia memprioritaskan penyatuan ekonomi nasional yang bercirikan nilai pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan nilai ketuhanan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menghasilkan, pertama, pemikiran dasar ekonomi Islam terdiri tauhid dan persaudaraan, bekerja dan produktivitas, kepemilikan dan distribusi berkeadilan. Prinsip ekonomi pancasila terdiri penyatuan ekonomi, sosial dan moral, pemerataan sosial, semangat nasionalistik, kerjasama, desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ekonomi kerakyatan terdiri perekonomian disusun azas kekeluargaan, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, segala kekayaan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kedua, persamaan ketiganya mencerminkan etika, norma dan moral, pemerataan, nilai nasionalistik, peran lembaga mikro, desentralisasi dan otonomi daerah. Perbedaannya mencerminkan etika, norma dan moral sesuai filosofi al-Quran dan al-Hadits, mewujudkan negara yang makmur, mengedepankan nilai *hablum minallah* dan *hablum minannas*.*

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.*

LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang. Ruang lingkup ekonomi yakni produksi dan distribusi barang dan jasa.¹ Pendapat lain, aksiologi yang relevan dalam teori ekonomi, yang dikaitkan langsung dengan kegiatan manusia di dunia ekonomi, yakni (1) konsumsi, (2) produksi, dan (3) pertukaran atau kegiatan pasar.² Hal inilah dapat mempertahankan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Semuanya berdampak bahwa manusia saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Perjalanan ekonomi global yang diawali oleh fakta-fakta betapa besar pengaruh dari dua sistem raksasa seperti sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Dalam konteks ekonomi, kedua sistem ini telah terbukti mampu meningkatkan kemakmuran rakyat di negara yang menggunakan kedua sistem tersebut, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet.³ Sistem ekonomi kedua ini memberikan kontribusi besar di bidang pembangunan yang mengarah kepada kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pada pertengahan abad ke-18, lahirlah faham baru yang dinamakan kapitalisme atau liberalisme. Sistem ekonomi ini merupakan pemikiran Adam Smith tahun 1723-1790 di Inggris. Faham ini lebih menitikberatkan dari pekerjaan ekonomi yang diletakkan kepada pekerjaan dan kepentingan diri.⁴ Lalu dilanjutkan keberadaannya dengan sistem baru yang ditawarkan oleh Friedrich List tahun 1789-1846 menjadi kapitalisme

negara. Selanjutnya muncul yang dinamakan sistem ekonomi kapitalisme campuran dari seorang pemikir Adolf Wagner lalu JM Keynes tahun 1883-1946. Pola sistem ekonomi baru ini dilatarbelakangi sebagai kritik, pelengkap atau memperbaiki, semuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁵

Demikian juga dengan pemikiran sosialisme yang mengadopsi pemikiran Karl Marx tahun 1818-1883 di negara Uni Soviet. Keruntuhan sistem ekonomi sosialis pada tahun 1991 pengaruh sistem ekonomi sosialis berkurang, tetapi beberapa negara yang masih menggunakan sistem sosialis berusaha menerima mainstream sistem yang berlaku disekitarnya,⁶ maka muncullah berbagai pemahaman sistem sosialis pasar dan mazhab-mazhab lainnya.

Pertentangan kedua kutub ekonomi tersebut dipengaruhi tentang ajaran agama terhadap kegiatan ekonomi sebagai apresiasi dari manusia yang beragama. Secara normatif bahwa ajaran agama dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi pada sistem ekonomi sebelumnya.⁷ Sementara itu sistem ekonomi Islam jauh lebih dahulu yang memberikan inspirasi pemikiran kedua sistem ekonomi besar tersebut, karena sistem ekonomi Islam diilhami al-Quran dan al-Hadits.

Penjabaran ekonomi atas berbicara banyak ruang lingkup dalam berbagai aspek, diantaranya: metodologi sistem ekonomi, pengertian sistem, prinsip dasar sistem ekonomi, asas sistem ekonomi dan cabang ilmu lainnya. Sistem ekonomi atau pemahaman berekonomi sudah banyak berkembang dan pengaruhnya untuk

¹Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 21-22.

²Hidajat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi)* (Yogyakarta: PLP2M, 1984), 8.

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2003), 82.

⁴Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39.

⁵Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), 4.

⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 84.

⁷Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi)* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 9.

kehidupan manusia hingga saat ini, diantaranya: ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi campuran, ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan yang banyak didengungkan dan dibicarakan baik sebagai ilmu pengetahuan maupun wacana akademik atau diskursus terutama di Indonesia.

Persoalan mendasar tentang ekonomi yakni bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan, keselamatan, dan kemakmuran hidup bagi orang banyak. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jejak demokrasi ekonomi, hal ini identik juga dengan demokrasi pancasila. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas penduduk muslim yang taat dalam beragama.

Suatu ideologi diterima secara luas, maka individu dan kelompok tidak ada hentinya memegang nilai-nilai yang terdefinisi dengan baik untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut sebagai makna sebenarnya atau interpretasi otentik dari ideologi dominan. Salah satu contohnya adalah demokrasi pancasila.⁸

Satu pendekatan mengenai sistem ekonomi pancasila yang disorot para pemerhati menjelaskan bahwa ekonomi pancasila adalah bukan sistem ekonomi tidak mewakili sesuatu pada sistem yang berjalan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, atau usaha patungan antara kapitalisme dan sosialisme. Diskursus sistem ekonomi pancasila berjalan paralel dengan kedua sistem ekonomi utama ini. Diskusi tentang sistem ekonomi pancasila, mencakup nilai-nilai pancasila sebagai lambang negara yang mungkin berbeda dari sistem kapitalis atau sosialis yang ada saat ini.⁹

Perdebatan di tahun 1982 an di kalangan keagamaan Indonesia tentang "Pancasila sebagai azas tunggal sebuah fondasi atau prinsip tunggal. Opini mencuat menimbulkan kegelisahan dan keresahan dengan munculnya diantara mayoritas komunitas muslim untuk mempertahankan persatuan dan keadilan di negara Indonesia.¹⁰ Sebagian kelompok ingin menegakkan Pancasila sebagai fondasi atau prinsip tunggal dalam aspek kebangsaan salah satunya harus memahami dengan baik apa arti Pancasila yang sebenarnya, sehingga dapat menjawabantahkan dalam bidang ekonomi.

Tantangan ekonomi Pancasila sekarang sebenarnya Indonesia berada disimpang jalan. Sejak tahun 1983, perekonomian mengalami proses liberalisasi, terutama di sektor moneter dan baru terbatas di sektor riil. Tapi pada masa reformasi, di bawah tekanan IMF, terjadi proses liberalisasi di sektor riil, di samping sektor moneter yang terus berjalan, ditandai dengan UU Bank Indonesia yang menetapkan independensi Bank Sentral.¹¹

Ideologi pancasila yang mengacu pada UUD 1945 dimana dalam sistem perekonomian tidak terlepas dari sebuah keadilan dan kesejahteraan bersama atau asas kekeluargaan. Paham ekonomi pancasila sudah dan sedang ditawarkan berbagai konsep, gagasan, prinsip guna dalam perbaikan sistem ekonomi di Indonesia.

Penganut lain, di tahun 1990an mencuat diskusi tentang ekonomi syariah ditandai munculnya bank syariah pertama di Indonesia. Dalam ajaran Islam telah memaparkannya dalam bab muamalah yaitu hubungan antar manusia, maka istilah ini merupakan sains sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang dijiwai

⁸R. William Liddle, "The Politics of Ekonomi Pancasila Some Reflection on Recent Debate", *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 18, No. 1 (March, 1982): 96-101.

⁹Peter McCawley, "The Economics of Ekonomi Pancasila", *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 18, No. 1 (March, 1982): 102.

¹⁰Sjafruddin Prawiranegara, "Pancasila as The Sole Foundation", in <http://www.jstor.org/stable>, accessed on Oct 1984.

¹¹M. Dawam Rahardjo, "Isu-isu Kontemporer Ekonomi Pancasila", *Jurnal UNISIA*, Vol. 27, No. 53 (Maret, 2004): 211.

dengan nilai-nilai syariah yang sejalan dengan Islam.¹²

Selain itu juga tawaran sistem ekonomi kerakyatan tidak kalah gencarnya. Bahwa ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Jika kita menelaah beberapa dari pemikiran dasar dari sistem ekonomi yang sedang diopiniikan ke masyarakat yakni ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan di atas. Wacana dan diskursus tentang ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan sampai saat ini masih berlangsung.

Bahwa sistem ekonomi apapun haruslah mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, keterbukaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya demi kemaslahatan umat, juga menganut prinsip universalitas yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.¹³

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu *pertama*, bagaimana pemikiran dasar dari ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan? Dan *kedua*, bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran dasar

dari ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat?

LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang pemikiran dasar ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkombinasikan tiga jenis perekonomian, yaitu ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *pertama*, Edi Suandi Hamid dalam jurnal "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Indonesia". Jurnal ini membahas bahwa makna ekonomi kerakyatan adalah suatu perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan orang banyak dalam aktivitas ekonomi, yakni aktivitas produksi, aktivitas konsumsi dan aktivitas distribusi. Fakta yang ada sangat berbeda, karena ekonomi kita terkonsentrasi pada segelintir pelaku ekonomi saja.¹⁴

Dan *kedua*, Mubyarto dalam buku "Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan". Buku tersebut memaparkan bahwa penerapan sistem ekonomi tidaklah cukup mudah. Disamping berbagai tantangan yang bersifat teknis dan politis bagi perekonomian Indonesia. Gagasan tentang sistem ekonomi Indonesia, yang dikenal dengan sebutan sistem ekonomi Pancasila, pada awal tahun 1980-an yang ternyata mendapat tanggapan yang penuh antusias dari berbagai kalangan.¹⁵

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif yang memaparkan pemikiran dasar ekonomi

¹²Hulwati, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)* (Jakarta: Ciputat Press, 2009), 9.

¹³Saeful Malik, "Ekonomi Syariah VS Ekonomi Kerakyatan", dalam <http://www.google.com/>. Diakses tanggal 18 Juni 2011.

¹⁴Edi Suandi Hamid, "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Indonesia", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2009): 8.

¹⁵Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan* (Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1987), 45-110.

Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan dan selanjutnya dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh sesuai dengan perkembangan saat ini. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.

Untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan, penulis melakukannya dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan data-data yang ada baik dan menganalisa data-data melalui buku-buku teks, dokumen lain, majalah dari web (internet) dan sebagainya.

Dalam penelitian ini setelah mendapatkan beberapa data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan

kesimpulan, beberapa cara yang terdapat dalam analisa data sebagai berikut: Analisis Deskriptif (*Descriptif Analysis*), data ini penulis sudah melakukan pemetaan tempat terhadap data-data yang akan dicari diberbagai tempat. Analisis isi (*Content Analysis*), peneliti mencoba menganalisa lebih dalam berkaitan buku, majalah, jurnal, penelitian bukan hanya isi pada data tersebut melainkan peneliti akan mengungkapkan latar belakang, waktu dan beberapa aspek didalamnya, penulis tersebut mengungkapkan pendapatnya diberbagai data yang terkumpul tersebut.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data sebagai berikut: Reduksi Data, Hal ini dilakukan dari pokok-pokok pemikiran ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan dijabarkan satu persatu secara utuh guna dapat menyimpulkan lebih komprehensif. Penyajian Data, peneliti memberikan kesimpulan tiap-tiap pemikiran pokok dari ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kaitannya kesejahteraan untuk masyarakat. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi, setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Teknik ini dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari beberapa prinsip-prinsip dasar dan juga peneliti harus dapat memahami mana yang lebih baik dari ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kaitannya kesejahteraan untuk masyarakat.

KONSEP DASAR

Definisi Ekonomi Islam

Persoalan besar mengenai ilmu dan sistem ekonomi yang mengalami kecarutmarutan sebuah pengelolaan yang mengakibatkan kemiskinan yang merajarela, pengangguran yang tinggi, biaya sekolah dan pendidikan makin tidak dirasakan oleh orang miskin sehingga hal ini jauh kearah kemakmuran dan kesejahteraan berekonomi untuk orang banyak khususnya masyarakat Indonesia.

Terdapat perbedaan istilah yang ditawarkan oleh beberapa pemikir Islam, ada yang menyebutkan dengan istilah ekonomi Islam ialah sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, cara pandang ekonomi non-Islam yang beredar sampai saat ini tidak akan sama dengan pandangan ekonomi Islam.¹⁶ Pandangan lain ekonomi Islam merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. istilah ini biasanya digunakan juga untuk menyebut ekonomi Islam.¹⁷ Pendapat lain, ekonomi Islam yakni rancangan ilmiah yang didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial.¹⁸

Pada akhirnya bermuara yang sama yakni terilhami oleh wahyu Illahi dari al-Qur'an dan al-Hadits. Konteks berekonomi dalam syariah terdapat batasan-batasan yang telah diantaranya: makan dari harta yang haram, mencari untung tapi menipu, mendapatkan harta dengan cara serakah dan masih banyak lagi aktifitas manusia yang dihadapkan seperti itu.¹⁹

Bukankah dahulu, kini dan akan datang ekonomi syari'ah hadir berbagai solusi persoalan luas baik persoalan ekonomi, budaya, politik dan sosial kemasyarakatan. Gagasan yang disajikan ekonomi syariah menganggap kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi maka sesungguhnya dia makin baik menjaga keseimbangannya. Semakin sholeh perilaku atau kehidupannya, maka semakin produktif aktivitas kesehariannya.²⁰

Pendapat lain mengungkapkan beberapa nilai-nilai jaminan sosial yang Islami diantaranya adalah: manfaat dari sumber-sumber daya harus dapat dinikmati oleh semua kalangan. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran sosial adalah hak sah bagi orang-orang yang miskin, prioritas untuk memenuhi tujuan bermanfaat dan penting bagi masyarakat, kebijaksanaan yang konsisten dengan cita-cita pemerataan pendapatan dan kekayaan secara adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana.

Definisi Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila, sebagaimana bisa terbaca dari tulisan para penggagasnya, dimaksudkan sebagai teori ekonomi dengan perspektif Indonesia. Secara konseptual gagasan Ekonomi Pancasila diproyeksikan mencakup dua aspek, yaitu *teori ekonomi murni* dan *teori ekonomi aplikatif untuk Indonesia*.²¹

¹⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 259.

¹⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 259.

¹⁸Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 51.

¹⁹Abul Hasan dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor: Longman Malaysia, 1992), 6.

²⁰Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 4.

²¹Tarli Nugroho, "Ekonomi Pancasila Refleksi Seteah Tiga Dekade", *Paper* (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, 2011), 9.

Definisi Ekonomi Kerakyatan

Beberapa tawaran lain, para ekonom mengenai sistem ekonomi yang dinamakan ekonomi kerakyatan. Dalam konsep ekonomi kerakyatan sebagai subsistem dari ekonomi pancasila, seharusnya aktivitas ekonomi diarahkan pada keterlibatan sebagian besar rakyat. Ekonomi ini diharapkan mampu memecahkan persoalan bangsa ini dengan berbagai ruang lingkupnya. Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan memiliki prinsip-prinsip dasar yakni yang termaktub sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²² Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.²³

²²M. Heriyadi, "Peranan Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Perekonomian Indonesia", dalam <http://www.google.com/>. Diakses tanggal 5 April 2012.

²³M. Heriyadi, "Peranan Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Perekonomian Indonesia", dalam

PEMBAHASAN DAN DISKUS

Pemikiran Dasar dari Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Menggunakan istilah prinsip ekonomi (*economic principle*) menyebutkan beberapa hal,²⁴ yaitu *pertama*, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berusaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Dan *kedua*, untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin, manusia dapat menggunakan benda pemuas kebutuhan yang ada.

Sistem ekonomi yang diterapkan diberbagai negara sudah banyak macamnya. Berbagai perdebatan sistem ekonomi yang ideal pernah *survive* lama di beberapa negara. Perbedaan yang mendasar sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya yakni terletak pada sebuah prinsip-prinsipnya.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan kemanfaatan, bukan saja di dunia namun juga berdampak kebaikan untuk kehidupan yang akan datang (akhirat). Yaitu diantaranya:

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan (*The Principle of Tawheed and Brotherhood*)

Ini menjadi landasan utama, seyogyanya dijadikan pegangan bagi manusia/insani, karena ini berkaitan dengan keimanan kepada TuhanNya. Alam dan segala isinya, diyakini bahwa tidak terjadi dengan sendiri. Juga terjadinya bukan tanpa hikmah. Karena dialah Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi beserta

<http://www.google.com/>. Diakses tanggal 5 April 2012.

²⁴Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2007), 173.

isinya bukan untuk sia-sia.²⁵ Berpijak dari hal tersebut bahwa segala aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syariah Allah SWT dan bertujuan akhir kembali kepada-Nya. Salah satu firman Allah yang mengisahkan ketauhidan yakni di dalam Surat Al-Ikhlas (112) ayat 1 yang artinya: *Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.*

Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi pilar pijakan yang menjadikan sistem yang akan dapat menciptakan kesejahteraan semuanya. Syariah telah mengajarkan manusia harus berbuat baik, tolong menolong sesamanya juga kasih sayang terutama kepada anak yatim, fakir miskin dan kaum yang lemah. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 10 yang artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.....

b. Prinsip Bekerja dan Produktivitas (*The Principle of Working and Productivity*)

Pandangan ekonomi Islam mengharuskan kita untuk bekerja keras, karena pada hakekatnya bekerja ialah sebagian dari ibadah. Karenanya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap sesamanya. Beberapa pernyataan Allah didalam kitab-Nya, bahwa bekerja yaitu kewajiban seorang muslim untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera baik didunia dan tujuan akhirnya untuk kehidupan akhirat.²⁶

Dalam ajaran Islam menyuruh kita untuk bekerja sepanjang hidupnya dengan sebaik-

baiknya. Hal ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia dalam surat At-Taubah (9); ayat 105, yang artinya:

Dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Hendaklah setiap pekerjaan akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT., rizki yang kita dapatkan dari hasil kerja atau keringat sendiri itu yang paling utama, namun ketika rizki itu didapat dengan cara meminta-minta atau juga dengan cara yang tidak halal maka itu pekerjaan yang dibenci oleh Allah SWT.

Seperti juga Q.S Ar-Rad (13) ayat 11; menerangkan bahwa: *Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Selanjutnya, prinsip dari produktivitas bahwa Islam menghendaki agar semua hamba-Nya mengerahkan segala kemampuannya dalam mengelola sumber daya alam sekitarnya dengan cara ketekunan yang diridhoi Allah SWT. Dalam QS. al-Jumu'ah (62) ayat 10, yang artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan*

²⁵Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), 11.

²⁶Alvien S. Haerisma, *Dinar dan Dirham (Studi Perkembangan dan Penerapan)* (Cirebon: Eduvision Publishing, 2011), 26-27.

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

c. Prinsip Kepemilikan (*The Principle Of Ownership*)

Islam mengakui hak individu dalam kepemilikan harta, tapi harta yang didapat haruslah dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Kepemilikan harta seseorang berdasarkan kemaslahatan sehingga saling menghormati, menghargai juga tidak ada kecemburuan antar status sosial yang lain. Hal ini semua merupakan amanah Allah yang hanya berupa titipan didunia. Sebuah firman Allah yang terpetik dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 29, yang artinya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.

Dalam konsep ekonomi Islam, nilai kepemilikan terletak pada moral. Kepemilikan memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasainya yang berlebih atas sumber-sumber ekonomi, karena kepemilikan harta secara absolut hanya milik Allah SWT semata.²⁷

d. Prinsip Distribusi Berkeadilan (*The Principle Of Distributional Equity*)

Distribusi berkeadilan merupakan asas keseimbangan tatanan ekonomi Islam. Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. memiliki peluang yang sama dalam memiliki, mengelola dan menikmati dari sumber daya yang diambilnya sesuai kemampuan untuk kebutuhan hidupnya. Seperti di dalam surat Al-Huud (11) ayat 61, yang artinya:

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah

ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).

Pemerataan kesempatan dalam segala hal, seyogyanya tidak boleh dibeda-bedakan dari golongan, ras, suku, status sosial, dan sebagainya. Setiap individu layak mendapatkan kesempatan dalam menikmati hidupnya secara layak dalam aspek kesehatan, bekerja, kenyamanan hidup, bersosial lainnya. Sehingga hak individu tidak terbatas oleh kepentingan orang-orang tertentu yang ingin memikirkan dirinya sendiri.

Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kebebasan berkehendak hendaknya mempunyai kemanfaatan (*kemaslahatan*) untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia di dunia. Apapun dapat kita lakukan dalam mengelola sumber daya namun dengan baik, tidak boleh membuat kerusakan sehingga merugikan bagi generasi ke depan.

Setelah kita memahami dari prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam di atas, mari kita berpikir kembali yang masih ragu dengan sistem ini. Sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai dan petunjuk dari Allah SWT sang pencipta seluruh jagat raya. Dengan mengucap syukur khazanah sistem ekonomi Islam di Indonesia sedang digeluti oleh berbagai kalangan baik pelajar, akademisi, praktisi juga ulama.

Beberapa peranan strategi ekonomi Islam khususnya di Indonesia dalam upaya menjangkau permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa kita sekarang guna mengangkat harkat dan martabat rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan, miskin moral dan juga material. Salah satu kontribusi institusi

²⁷Yulia Hafizah, "Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam", *Millah*, Vol. 4, No. 2 (Januari, 2005): 39.

syariah dalam pembangunan di Indonesia tentu akan mengembangkan berbagai turunan syariah, ilmu, sistem, sumber daya manusia, komunitas dan lingkungan sekitar.

Sofyan S. Harahap mengemukakan pendapatnya pada saat pembukaan acara SeCOND yang lalu diselenggarakan oleh FE-UI sebagai keynote speaker, kontribusi yang diberikan oleh berbagai ilmuwan, ulama, dan tokoh masyarakat dalam penerapan sistem ekonomi Islam telah terbukti,²⁸ diantaranya:

- 1) Mendorong mereka yang menolak bunga bank masuk bank.
- 2) Pengembangan usaha kecil dan menengah melalui dana pembiayaan dari BMT.
- 3) Mendorong sektor filantropis melalui zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- 4) Mendorong implementasi syariah disegala bidang.
- 5) Memacu lahirnya industri lain yang menyokong perbankan seperti asuransi syariah, pasar modal syariah dan berbagai sektor riil.
- 6) Menggerakkan perhatian para ahli muslim dan non-muslim pada pengembangan konsep ekonomi Islam.
- 7) Berkembangnya institusi-institusi pendidikan yang membuka program studi ekonomi Islam dan perbukuan yang membahas topik-topik ekonomi Islam.
- 8) Mendorong proses Islamisasi Ilmu dan bidang lainnya.

Dengan lahirnya institusi syariah ini maka entitas itu menjadi laboratorium hidup bagi kita untuk menguji dari penerapannya dengan nilai-nilai dan konsep Islam dalam

bidang muamalah dan turunannya. Semua keberhasilan elemen-elemen dan sistem ekonomi Islam ini sangat tergantung pada umatnya sendiri yang menjalankannya terutama akademisi sebagai peramu menu sebelum memasuki *strike competitive* (persaingan tajam). Masa depan ekonomi Islam tergantung dipundak kita semua, baik pemimpin negara sampai rakyat jelata bahwa ini adalah salah satu perjuangan atau *jihad fisabillah* karena kita sudah melihat dan mengalami setiap yang bathil akan hancur. Mari kita hijrah dari sistem ekonomi yang bathil menuju ke sistem yang lebih berkah yakni ekonomi Islam.

a. Pemikiran Dasar Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau istilah lain *ekonomi pasar terkendali*.²⁹

Reformasi sistem ekonomi merupakan reformasi aturan main hubungan-hubungan ekonomi yang mutlak perlu mempertimbangkan ideologi Pancasila dan demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila mengacu pada setiap sila sebagai berikut,³⁰ yaitu:

1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;
3. Semua pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah (sebagai

²⁸Yulia Hafizah, "Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam", 27.

²⁹Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 28.

³⁰Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*, 28-29.

produsen sekaligus konsumen) selalu bersemangat nasionalistik yang dalam setiap putusan ekonominya memomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh;

4. Koperasi dan organisasi-organisasi ekonomi yang selalu mengedepankan kerjasama (*cooperation*) dan tindakan bersama (*collective action*) menjadi sokoguru kegiatan ekonomi masyarakat;
5. Dalam perekonomian Indonesia yang luas dan beragam terus menerus diupayakan keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui partisipasi aktif setiap daerah, aturan main keadilan ekonomi berjalan sehingga menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

b. Pemikiran Dasar Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itupun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.³¹ Pancasila pada sila ke-5 berbunyi: *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, yang berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan. Salah satu penjelasan diatas yakni ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai filosofis sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 dari penjelasan Sila Keadilan social.³²

³¹Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, 1997), 4.

³²Darji Darmodiharjo, et al., *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan*

Terdapat tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan yang termaktub didalam UUD 1945 Pasal 33, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjabaran dari prinsip dasar ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi memiliki penjelasan bahwa: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.³³

Persamaan dan perbedaan pemikiran dasar dari ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat.

No.	Persamaan
1.	Pemikiran dasar semua sistem ekonomi baik ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan mencerminkan etika, norma dan moral.
2.	Pemikiran dasar sistem ekonomi mewujudkan pemerataan dari ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat khususnya di Indonesia.
3.	Peran serta pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah di dorong memiliki jiwa semangat sebagai individu

Yuridis Konstitusional (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1991), 46-47.

³³Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, 4.

- atau warga negara yang memiliki ruh nasionalis.
4. Sistem ekonomi ekonomi baik ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan melibatkan peran lembaga-lembaga mikro seperti: koperasi dan organisasi-organisasi ekonomi, ini sebagai bukti bahwa sistem ini mengedepankan kerjasama (*cooperation*) dan tindakan bersama (*collective action*).
 5. Sistem semua ini mengupayakan keseimbangan antara perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi dan otonomi daerah.
 6. Semua sistem ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan memiliki tujuan yang sama yakni untuk kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau umat lainnya.

No.	Perbedaan
1.	Prinsip dasar ekonomi Islam mencerminkan etika, norma dan moral sesuai filosofi Al-Quran dan Al-Hadits.
2.	Prinsip dasar ekonomi Islam, yakni sistem yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sehingga mewujudkan negeri <i>Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur</i> .
3.	Peran serta pelaku ekonomi sebagai produsen, konsumen, dan pemerintah mengedepankan nilai <i>Hablum Minallah</i> dan <i>Hablum Minannas</i> .
4.	Sistem Ekonomi Pancasila dan Kerakyatan mengakar dari <i>Bottom Up</i> , namun Sistem Ekonomi Islam mengakar dari <i>Bottom Up</i> dan <i>Top down</i> .

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menyimpulkan dua macam, yaitu pertama, pemikiran dasar ekonomi Islam terdiri tauhid dan persaudaraan, bekerja dan produktivitas, kepemilikan dan distribusi berkeadilan. Prinsip ekonomi pancasila terdiri penyatuan ekonomi, sosial dan moral, pemerataan sosial, semangat nasionalistik, kerjasama, desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ekonomi kerakyatan terdiri perekonomian disusun azas kekeluargaan, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, segala kekayaan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dan kedua, persamaan ketiganya mencerminkan etika, norma dan moral, pemerataan, nilai nasionalistik, peran lembaga mikro, desentralisasi dan otonomi daerah. Perbedaannya mencerminkan etika, norma dan moral sesuai filosofi al-Quran dan al-Hadits, mewujudkan negara yang makmur, mengedepankan nilai *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Baswir, Revrison. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA, 1997.
- Darmodiharjo, Darji et al. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1991.
- Haerisma, Alvien S. *Dinar dan Dirham (Studi Perkembangan dan Penerapan)*. Cirebon: Eduvision Publishing, 2011.
- Hafizah, Yulia. "Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam", *Millah*, Vol. 4, No. 2 (Januari, 2005).
- Hamid, Edi Suandi. "Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap

- Indonesia”, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2009).
- Hanafi, Syafiq M. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi)*. Yogyakarta: Cakrawala, 2007.
- Hasan, Abul dan Aidit Ghazali (Ed). *Reading in Islamic Economic Thought*. Selangor: Longman Malaysia, 1992.
- Heriyadi, M. “Peranan Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Perekonomian Indonesia”, dalam <http://www.google.com/>. Diakses tanggal 5 April 2012.
- Hidayat, Mohamad. *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Hulwati. *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)*. Jakarta: Ciputat Press, 2009.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Liddle, R. William. “The Politics of Ekonomi Pancasila Some Reflection on Recent Debate”, *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 18, No. 1 (March, 1982).
- Malik, Saeful. “Ekonomi Syariah VS Ekonomi Kerakyatan”, dalam <http://www.google.com/>. Diakses tanggal 18 Juni 2011.
- McCawley, Peter. “The Economics of Ekonomi Pancasila”, *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 18, No. 1 (March, 1982).
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1987.
- _____. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000.
- _____. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Nataatmadja, Hidajat. *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi)*. Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Nugroho, Tarli. “Ekonomi Pancasila Refleksi Seteah Tiga Dekade”, *Paper*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, 2011.
- Prawiranegara, Sjafruddin. “Pancasila as The Sole Foundation”, in <http://www.jstor.org/stable>, accessed on Oct 1984.
- Rahardjo, M. Dawam. “Isu-isu Kontemporer Ekonomi Pancasila”, *Jurnal UNISIA*, Vol. 27, No. 53 (Maret, 2004).
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2003.
- Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2007.